

Bapemperda DPRD Trenggalek: Penyertaan Modal BPR Jwalita Tetap Dilanjutkan

Agus Riyanto - TRENGGALEK.INDONESIASATU.ID

Mar 9, 2022 - 13:46



Suasana rapat kerja Bapemperda DPRD Kabupaten Trenggalek bersama tim asistensi

Trenggalek - DPRD Kabupaten Trenggalek melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat kerja bersama tim asistensi Pemkab, membahas hasil fasilitasi dari gubernur.Kamis (3/3/2022).

Salah satu pokok bahasannya adalah terkait Rancangan Peraturan Daerah

(Raperda) penyertaan modal ke BPR Jwalita. Sehingga Bapemperda melanjutkan Raperda tersebut." Dari hasil konsultasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) penyertaan modal ke BPR Jwalita tetap dipaksakan. Meskipun tidak ada anggaran, supaya perekonomian di Kabupaten Trenggalek bisa menggeliat, " kata Kholis Widodo, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Trenggalek.

Kholis menuturkan, pihaknya akan melakukan sinkronisasi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek, dimana penyertaan modal ke BPR Jwalita akan tetap dilakukan demi meningkatkan perekonomian masyarakat Trenggalek. Tak terkecuali membantu para pelaku usaha.

"Kami menargetkan Raperda Penyertaan Modal ke BPR Jwalita ini akan rampung pada tahun 2022 mendatang, " imbuhnya.

Politisi dari PKB ini menyampaikan, pada dasarnya Bapemperda DPRD Kabupaten Trenggalek telah membantu dan berupaya keras memenuhi kebutuhan BPR Jwalita tersebut, meskipun tidak terpenuhi semua.

" Ada permintaan, nominalnya Rp 5 miliar pertahun. Akan tetapi keuangan daerah tidak mampu. Intinya, berapapun nilainya, yang penting sudah bisa membantu, " ungkapnya.

Selanjutnya, dia menjelaskan, penyertaan modal tersebut akan dilakukan secara berkala setiap tahun. Namun juga harus menunggu kesiapan keuangan di Bakeuda.

" Dulu tidak ada batasan waktu, cuma ada pembicaraan berapa jumlah penyertaan modal tersebut. Sekarang beluk bisa terpenuhi semuanya, " tandasnya.

Dia juga menyebut, saat ini proses fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur terhadap 39 Propemperda tahun 2022 sudah selesai dan bisa dilanjutkan. Namun, untuk melanjutkan tergantung dari kebijakan dan kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek (ags).